

## **Memilih Presiden Perlu Refleksi Kritis**

**Oleh: Novri Susan, S. Sos<sup>\*</sup>**

Pertama kali pada 5 Juli 2004 nanti rakyat Indonesia akan merasakan bagaimana memilih sepasang pimpinan nasional, presiden dan wakil presiden, secara langsung. Presiden pertama republik Indonesia, Ir. Soekarno, terpilih berdasarkan aklamasi karena faktor baru terbentuknya negara Indonesia. Presiden kedua terpilih karena ada surat sakti 'supersemar' yang sebagian pihak menyebutnya sebagai kudeta terselubung. Presiden ketiga, B.J Habibie karena *lungsuran* dari rezim sebelumnya. Persiden keempat, KH Abdurrahman Wahid terpilih dengan cukup demokratis di parlemen pada tahun 1999. Presiden kelima terpilih karena faktor permainan politik (*political game*) yang terjadi di atas isu KKN presiden sebelumnya.

Terlepas dari dinamika pergantian kekuasaan selama ini, sebenarnya rakyat Indonesia sebagai pemilik syah negeri ini hanyalah menjadi penonton pasif saja dalam proses politik nasional. Masyarakat adalah penonton yang dipaksakan membayar tiket dalam bentuk suara sakti dalam pemilihan umum, yang tentu saja memilih elit-elit kekuasaan yang ingin naik posisinya dari sekedar jenderal menjadi presiden, misalnya.

Dalam prosesi pemilihan presiden 2004, sesuatu yang sangat menarik adalah fenomena pergerakan kekuasaan para elite politik di Indonesia. Bagaimana elite berusaha membangun kekuasaannya melalui peningkatan kekuatan politiknya. Artinya, kita menyaksikan bagaimana setiap elite politik Indonesia berjuang mendapatkan sumber kekuasaan terbesar, yaitu sebagai presiden. Memang ada slogan-slogan menggoda rasa simpati dan terkesan humanis yang mereka sebar, baik dalam bentuk wacana-wacana kesejahteraan maupun pengorbanan sebagai anak bangsa. Benarkah?

Satu metode yang perlu berkembang untuk menjawab itu adalah metode kritik. Metode kritik berangkat dari perkembangan intelektual ilmu-ilmu sosial yang ditujukan untuk memberikan ruang emansipasi yang bebas dari dominasi kekuasaan menindas. Pemikiran ilmu sosial kritis mendapatkan jawaban intelektual tentang emansipasi yang bebas dari kekuasaan menindas dari Juergen Habermas, yang

---

<sup>\*</sup> Novri Susan adalah Pengajar Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

ditempatkan sebagai generasi kedua madzab kritis di Frankurt Jerman. Selain itu, jauh sebelum Habermas adalah Ibnu Khouldun yang mengembangkan alur berpikir kritis terhadap kelompok-kelompok kekuasaan (Hakim, 2004). Dan seorang ilmuwan sosial kritis lainnya yang secara khusus mengkritisi elit kekuasaan adalah Charles W. Mills di Amerika (*The Power Elite*, 1956). Mills melakukan riset terhadap struktur sosial Amerika yang dari penelitian itu diperoleh suatu hubungan dominatif antara elit dan rakyat. Hubungan dominatif itu terbangun karena elit-elit berusaha memperoleh dukungan politis rakyat dengan menguasai kesadaran.

Para elite bergerak demi kepentingan mobilitas vertikal mereka secara ekonomi dan politik. Elite-elite itu adalah militer, politisi, dan para pengusaha (ekonomi). Mills menemukan bahwa mereka, para elit kekuasaan, mempunyai kecenderungan untuk kaya, baik diperoleh melalui investasi atau duduk dalam posisi eksekutif. Satu hal penting lagi, mereka yang termasuk dalam elit kekuasaan sering kali pindah dari satu bidang yang posisinya tinggi dalam bidang tinggi lainnya. Kasus Amerika, Mills memberi contoh Jenderal Eisenhower yang kemudian menjadi Presiden Eisenhower. Ada contoh lain yang diungkapkan Mills, seperti seorang laksmana yang juga seorang bankir, seorang direktur, dan menjadi pimpinan perusahaan ekonomi terkemuka.

Elite-elite kekuasaan mempunyai keinginan besar terhadap perkembangan diri mereka dan tentu saja secara politis mereka membutuhkan dukungan dari rakyat. Media massa yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam menyampaikan isu-isu nasional merupakan alat bagi elit kekuasaan untuk meraih dukungan itu, yaitu melalui proses komunikasi informasi satu arah bukan dialog atau dengan kata lain menguasai kesadaran dengan wacana yang diproduksi elite. Proses itu merupakan bagian dari indoktrinasi dan persuasi elit-elit kekuasaan. Masyarakat hanya bersifat pasif sebagai penadah informasi-informasi elit kekuasaan.

Satu hal penting lainnya yang mengakibatkan mudahnya rakyat terpengaruh atau terpedaya (tertindas) dalam proses indoktrinasi dan persuasi, adalah karena rakyat tidak cukup mengetahui realitas atau kebenaran sejati tentang wacana yang mereka masukkan kedalam kepala mereka, Mills menyebut mereka sebagai masyarakat massa (*mass society*). Masyarakat massa seperti kerbau yang dicocok hidungnya karena tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran yang sejati tentang isi dari wacana atau informasi para elite, yang kemudian menganggap benar adanya wacana itu dengan sangat lugu. Kesadaran itu adalah kesadaran semu. Kesadaran

semu pada dasarnya adalah kesadaran yang terbentuk bukan karena kebenaran dan kepentingan yang nyata, melainkan pada harapan-harapan maupun nilai-nilai yang tidak nyata.

Kita bisa menyaksikan di Indonesia elit-elit kekuasaan yang disebutkan Mills dari golongan politisi, militer, dan pengusaha ekonomi mempunyai karakter dan gerakan yang serupa. Elit-elit kekuasaan di Indonesia menciptakan hubungan dominatif dengan rakyat. Mereka juga senantiasa bergerak mencapai posisi yang tinggi ke posisi (lebih) tinggi lainnya. Pada pemilihan presiden tahun ini dapat ditemukan tiga orang elit dari militer berusaha mencapai posisi yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, yaitu presiden atau wakil presiden. Ada dua orang calon wakil presiden yang sebelumnya merupakan elit pengusaha dan pejabat pemerintahan. Ada juga yang dulunya hanya aktifis politik dan bersuami pengusaha bahkan telah menjadi presiden. Tampaknya jelas sekali bahwa para elit kekuasaan pada saat ini tengah melakukan pergerakan mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya untuk mobilitas vertikal secara ekonomi maupun politik.

Pada proses pergerakan elit-elit kekuasaan di arena persaingan mencapai posisi lebih tinggi dari posisi tinggi sebelumnya, salah satu gerakan mereka adalah menemukan dan membangun dukungan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan Mills, masyarakat yang luas dicapai melalui media massa yang berposisi dan berperan strategis dalam menebarkan wacana. Para elite melakukan proses persuasi dan indoktrinasi terhadap masyarakat luas melalui media massa, dalam bentuk iklan di televisi dengan pernyataan-pernyataan bombastis. Persuasi dan indoktrinasi itu memberikan efek yang sangat diharapkan elite, yaitu terbentuknya kesadaran-kesadaran semu rakyat, seperti yang disebut di atas, yang tidak mengetahui apa yang sesungguhnya benar.

Pada sisi lain, karakter sosio kultural masyarakat Indonesia secara umum, seperti primordialisme etnik maupun agama yang merupakan induk komunalisme dalam sistem sosial, pragmatisme masyarakat yang menjadi begitu mudah mengiyakan karena sedikit uang, dan kepercayaan terhadap mitos-mitos irasional seperti adanya *satrio pininingit* (sang penyelamat), merupakan modal dasar bagi para elit untuk semakin mempermudah membangun kesadaran semu. Elit kekuasaan mengolah sosio kultural masyarakat sedemikian rupa cerdiknya dan menciptakan kesadaran-kesadaran semu yang akan termanifestasi dalam perilaku politik fanatik dan agak gila.

Ketika kesadaran masyarakat telah menjadi semu, elite begitu mudah mengontrol dan 'memaksa' masyarakat untuk mengikuti ajakan dan sekaligus membela ajakan itu. Pada kasus pemilihan presiden 2004 ini, masyarakat bersedia memilih elit kekuasaan karena kesadaran semu hasil konstruksi para elit. Artinya, masyarakat memilih karena kesadaran semu yang tidak berangkat dari kesadaran atas kepentingan yang nyata dan kebenaran akal sehat, seperti karena wacana yang belum dibuktikan kebenarannya, *satrio piningit*, karena uang, karena hubungan primordial, dan lain-lainnya.

Pada kondisi masyarakat yang berkesadaran semu, pemilihan presiden langsung nanti hanyalah akan menghasilkan penguasa yang tidak menyadari kepentingan nyata masyarakat, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan, melainkan penguasa yang hanya akan memberi dunia semu. Dunia semu pernah diciptakan oleh Soeharto pada masa Orde Baru-nya, dan kita bersaksi atas hal itu, dimana rakyat menanggung penderitaan luar biasa atas nama pembangunan dan stabilitas negara yang sebenarnya adalah stabilitas kekuasaan. Kebanggaan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan. Hasilnya, Indonesia begitu mudah jatuh dalam krisis ekonomi yang akut karena daya tahan ekonomi riil atau daya tahan ekonomi rakyat sangat lemah.

Kita semua berharap bahwa pada pemilihan presiden langsung 2004, yang akan melahirkan kekuasaan dengan tingkat legitimasi super kuat dari rakyat, akan menemukan seorang pemimpin nasional yang lahir atas dasar kepentingan nyata dan akal sehat yang bersih dari masyarakat. Harapan itu tentu saja akan terkabul jika pemilih menggunakan kesadaran atas kepentingan yang nyata dari dirinya dan kebenaran akal sehat yang akan memberikan kalkulasi benar-salah pada sisi kapasitas, maupun baik dan buruk pada sisi moralitas para elite yang mencalonkan diri sebagai pimpinan nasional.

Agar terbentuk kesadaran yang sejati tentu saja kita harus membesihkan kesadaran semu yang telah diciptakan para elit melalui proses persuasi dan indoktrinasi. Pembersihan itu dengan cara memilah dan menilai antara yang belum tentu nyata atau benar dengan dunia nyata yang jelas terlihat. Misalnya, rakyat dapat memilah slogan elite dengan realitas keseharian elite, artinya melakukan pemilahan antara slogan yang belum tentu nyata dengan keseharian elit yang pasti nyata. Jika elite berslogan tentang berantas kemiskinan dan kesejahteraan, rakyat dapat melihat bagaimana keseharian elite hidup, apakah dia telah bersolidaritas terhadap kemiskinan

rakyat atau malah mengantongi kekayaan dan kemewahan? Dari mana kekayaannya itu? Seberapa besar telah berzakat secara ikhlas dengan pedoman agama?

Contoh lain, saat ini isu yang berkembang adalah masalah keamanan dan keadilan Indonesia akan selesai jika dipimpin orang berpengalaman dalam bidang keamanan, yaitu militer. Pada gilirannya, masyarakat yang pasif, dan rindu ketenangan, akan begitu mudah menerima isu itu sebagai kebenaran dan bersedia mendukung elit-elit kekuasaan dari militer. Wacana Indonesia akan aman jika dipegang oleh militer merupakan informasi yang sangat tidak lengkap dan sangat menipu. Karena siapa yang menyebabkan negara ini tidak aman dan apa saja faktor-faktor penyebabnya tidak menjadi bagian dari wacana yang disebarkan elite, tentu saja terutama dari elite militer.

Rakyat Indonesia perlu melakukan refleksi kritis terhadap hubungan mereka dengan para elit kekuasaan. Rakyat perlu, dan penting, untuk melakukan evaluasi terhadap para elit kekuasaan yang sekarang sedang mencalon sebagai presiden. Evaluasi terhadap isu-isu yang dikembangkan elite, dan evaluasi terhadap pergerakan mereka; hanya ingin memperoleh posisi lebih tinggi atau karena mempunyai visi misi yang mendasarkan pada realitas kebenaran dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pada kondisi ini kemampuan masyarakat membersihkan kesadaran semu yang diciptakan elite sangatlah penting. *Wallahu a'lam!*